

DIPA FISIP

LAPORAN PENELITIAN



Kesenjangan Digital (*Digital Divide*) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (Studi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kab. Pesawaran)

Oleh:

Nana Mulyana, S.I.P., M.Si.	(Ketua)
Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.	(Anggota)
Anisa Utami, S.I.P., M.A	(Anggota)

Dibiayai oleh Dana DIPA FISIP Universitas Lampung
Dengan Nomor Kontrak: 531/UN26.16/KU.02.00.01/2018

**ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

1. Judul : Kesenjangan Digital (*Digital Divide*) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (Studi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kab. Pesawaran)
2. Bidang Penelitian : Sosial
3. Ketua Tim Pengusul :
 - a. Nama Lengkap : Nana Mulyana, S.I.P., M.Si.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP / NIDN : 197106152005011003 / 0015067115
 - d. Disiplin Ilmu : Administrasi Publik
 - e. Pangkat/Golongan : Penata III/c
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor
 - g. Fakultas/Jurusan : FISIP/Administrasi Publik
 - h. Alamat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Rajabasa
 - i. Telp Kantor : (0721) 704626
 - j. Hp / Email : 085268661442 / akhangnana71@gmail.com
4. Jumlah Anggota (2 orang) : 1. Intan Fitri Meutia, Ph.D. / 198506202008122001
2. Anisa Utami, S.I.P., M.A. / -
5. Lokasi Penelitian : Kabupaten Pesawaran
6. Jumlah Biaya Yang Diusulkan : Rp. 10.000.000,-

Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Negara

Bandarlampung, September 2018
Ketua Peneliti,

Dr. Noverman Duadji, M.Si
NIP. 19691103200111002

Nana Mulyana, M.Si
NIP. 197106152005011003

Menyetujui,
Kepala LPPM Universitas Lampung

Dekan,

Warsono, Ph.D
NIP. 196302161987031003

Dr. Syarief Makhya
NIP. 195908031986031003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di era global kini sudah tidak bisa dihindari, perkembangan yang relative pesat dan membawa begitu banyak perubahan baik perubahan dalam sisi positif maupun perubahan negative yang tak kalah banyaknya. Berbagai bentuk produk yang dihasilkan dari teknologi itu sendiri hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat, dalam hal ini masyarakat secara tidak langsung mengikuti arus perkembangan zaman jika tidak ingin terbelakang secara teknologi atau biasa disebut dengan istilah gaptek (gagap teknologi). Belakangan ini teknologi khususnya teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dikalangan masyarakat modern dari yang tua hingga muda yang membuat teknologi menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia pada era ini. Dalam perkembangannya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, perusahaan penyedia pelayanan pada manajemen dan penyimpanan data *NetApp* pada tahun 2014 merilis data yang memperlihatkan mengenai pertumbuhan penggunaan internet dari tahun 1995 sampai 2014. Mengutip dari media online *Metrotvnews.com*, dari data yang dirilis oleh *NetApp*, diketahui bahwa selama 20 tahun jumlah pengguna internet mengalami lonjakan yang cukup signifikan dari semula hanya sekitar 44 juta pengguna pada tahun 1995, menjadi hampir 3 miliar pengguna pada tahun 2014. Dari data tersebut kita dapat melihat betapa pesatnya perkembangan teknologi dari waktu ke waktu.

Perkembangan teknologi dalam sebuah Negara dapat dijadikan tolak ukur kemajuan suatu Negara. Semakin tinggi dan maju peradaban dalam suatu Negara, maka teknologinya akan semakin maju. Indonesia yang merupakan Negara berkembang yang bisa dibilang perkembangan teknologi dan informasinya pun berkembang cukup pesat, hanya saja belum merata. Akses teknologi komunikasi dan informasi hanya dimiliki oleh kota-kota besar saja. Indonesia memiliki masalah yang cukup pelik dalam pemerataan teknologi, masalah tersebut adalah mengenai besarnya bentang alam. Yang dimaksud bentang alam disini adalah wilayah Indonesia lebih banyak laut daripada daratan yang membuat pemerataan teknologi terbaru berjalan cukup lambat. Pada Negara maju seperti Korea Selatan yang memiliki bentang alam yang relative tidak rumit telah bersiap diri untuk mengembangkan jaringan 5G, dimana di Indonesia bahkan masih banyak wilayah yang tidak tersentuh jaringan 3G. Pada tahun 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, disparitas antara wilayah timur dan barat membuat peringkat Indonesia ada pada urutan 111 dari total 176 negara dengan indeks sebesar 4,34. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di atas Kamboja, Timor Leste, dan Myanmar. Namun Indeks pembangunan teknologi, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina dan Vietnam masih mengungguli Indonesia

Dikutip dari media online *katadata.co.id* Kepala BPS Suhariyanto mengatakan bahwa Indonesia memiliki 34 provinsi dengan kesenjangan teknologi informasi yang cukup besar, 34 provinsi di Indonesia dibagi menjadi 4 kategori yaitu tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. 9 provinsi dinyatakan tinggi, 5 provinsi sedang, 8 provinsi rendah, dan 9 provinsi sangat rendah. Penghitungan pembangunan teknologi menggunakan 11 indikator dengan 3 subindeks, yaitu akses dan infrastruktur, penggunaan, dan keahlian.

Tempat pertama dengan indeks paling tinggi yaitu DKI Jakarta. 9 provinsi yang masuk kategori sangat rendah antara lain Aceh, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Lampung merupakan provinsi diujung Pulau Sumatra yang jaraknya relative cukup dekat dengan kota besar dan juga merupakan ibu kota Negara Indonesia sekaligus kota yang memiliki indeks pembangunan teknologi paling tinggi dibandingkan kota-kota lainnya, memiliki indeks pembangunan teknologi yang sangat rendah. Secara sederhana, dapat dikatakan adanya kesenjangan digital antara wilayah-wilayah di Indonesia terutama provinsi Lampung. Kesenjangan digital dapat diartikan sebagai perbedaan akses terhadap Teknologi. Kesenjangan Digital menurut OECD atau *Organisation for Economic Cooperation and Development*, kesenjangan digital adalah kesenjangan diantara individu, rumah tangga, bisnis, dan area geografis pada level perbedaan social ekonomi yang berhubungan dengan kesempatan untuk mengakses informasi dan TI serta penggunaan internet untuk berbagai aktivitas sehari-hari (Zulham, 2014). Namun demikian, provinsi Lampung tetap terus mengupayakan mengembangkan penerapan teknologi modern dari berbagai sektor dalam berbagai bidang demi kemajuan daerah Lampung. Salah satunya adalah pada sektor pendidikan. Pada sektor ini, pemerintah daerah Lampung menerapkan program Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang merupakan program pemerintah pusat. UNBK pertama kali digunakan secara terbatas pada tahun 2014 dan dilaksanakan secara bertahap setiap tahunnya. UNBK adalah salah satu sistem yang mengikuti perkembangan zaman. Sebagaimana diketahui, jika anak-anak zaman sekarang sangat melek teknologi, tidak terkecuali komputer. Dibandingkan dengan mengisi kertas ujian, CBT sangat jelas jauh lebih praktis. Selain itu, tindak kecurangan pun dapat

diminimalkan karena soal-soalnya bisa diacak sesuai dengan jumlah siswa. Dari segi anggaran dan distribusi, UNBK lebih efisien. Soal-soal ujian tidak perlu dicetak dan didistribusikan secara manual, cukup disinkronisasi dari server pusat ke sekolah-sekolah. Begitu pula dengan lembar jawaban. Jadi, tidak ada istilah soal ujian dan lembar jawaban terlambat dikirim, rusak atau hilang. Satu lagi kelebihan dari CBT yaitu hasil ujian dapat diketahui lebih cepat. Sistem *online* memangkas jaringan distribusi serta menghemat waktu untuk mengoreksi seluruh jawaban siswa, sehingga siswa tidak perlu menunggu lama sampai hasilnya diumumkan.

Selain dari keunggulan-keunggulan yang telah disebutkan, tentu ada kekurangan dari program UNBK ini. Keterbatasan jumlah komputer, pasokan listrik, maupun jaringan internet memang masih menjadi kendala utama bagi sistem ujian berbasis komputer. Agar dapat mengadakan UNBK, suatu sekolah memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk mengantisipasi listrik padam saat ujian misalnya, sekolah perlu menyediakan genset yang dayanya mencukupi. Sayangnya, ketersediaan listrik, internet, dan komputer memang belum merata hingga ke pelosok-pelosok Nusantara. Tidak semua sekolah mampu menjalankan sistem CBT akibat terbatasnya sarana dan prasarana. Salah satu wilayah atau lokasi sekolah yang melaksanakan UNBK yaitu SMP Negeri 25 Pesawaran yang mulai tahun ini sudah menerapkan system Ujian Nasional yang berbasis komputer. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran menambah dan melakukan perbaikan terhadap sejumlah gedung sekolah yang ada di Kabupaten Pesawaran, sekolah yang mampu melakukan ujian Nasional Berbasis Komputer untuk pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2018.

Ada beberapa permasalahan yang terjadi di SMP Negeri 25 Pesawaran yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Pesawaran Ibu Dra. Uniroh, diantaranya tidak adanya computer yang dimiliki oleh sekolah, baik laboratorium computer atau mata pelajaran computer itu sendiri. Kemudian jaringan internet yang tidak merata, selain adanya computer server dan client, syarat utama pelaksanaan UNBK adalah tersedianya jaringan internet yang stabil, kaitannya dengan wilayah yang jaringan internetnya sangat minim. Selanjutnya listrik yang mudah padam, hal pokok yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan UNBK adalah aliran listrik, walaupun computer tersedia, jaringan internet lancar, tetapi listrik sering kali padam karna daya listrik untuk menampung beberapa computer di sekolah sangat banyak.

Berdasar pada hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dalam penelitian ini mengangkat judul **“Kesenjangan Digital (Digital Divide) Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (studi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kab. Pesawaran)”**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasar dari permasalahan yang telah dijelaskan diatas mengenai kesenjangan digital yang terjadi di SMP Negeri 25 Kabupaten Pesawaran kaitannya dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) peneliti tertarik untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut. Dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Ujian Nasional di SMP Negeri 25 Kabupaten Pesawaran?

2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan digital di SMP Negeri 25 Pesawaran?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP Negeri 25 Kabupaten Pesawaran.
2. Untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan digital di SMP Negeri 25 Pesawaran.

1.4.Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada teori Kesenjangan Digital atau *Digital Divide*. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perbaikan kualitas pelayanan pendidikan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi bagi Dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran umumnya Pemerintah Provinsi Lampung serta provinsi lainnya di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Yayat D. Hadiyat, 2014, menganalisis mengenai Kesenjangan Digital yang terjadi pada Kabupaten Wakatobi sebagai salah satu wilayah kepulauan memiliki tantangan yang berbeda dalam pengembangan TIK dibanding wilayah daratan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan digital di Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi langsung. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ada tiga hal yang berpengaruh pada kesenjangan digital di Kabupaten Wakatobi yaitu infrastruktur TIK yang tidak memadai karena kondisi geografis yang menyebabkan pembangunan infrastruktur TIK menjadi sulit dan mahal, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih banyak berada pada level menengah ke bawah sehingga TIK belum menjadi kebutuhan yang penting, dan kurangnya peran pemerintah dan swasta dalam pemerataan dan memasyarakatkan TIK.

Yeni Aprilia, 2015, meneliti kesenjangan digital pada pondok pesantren dimana pondok pesantren sangat membatasi akses santri terhadap gadget. fenomena tersebutlah yang menjadi perhatian untuk mengetahui gambaran mengenai kesenjangan digital dikalangan santri pada Pondo Pesantren salaf. Penelitian ini menggunakan konsep kesenjangan digital dari Jan A. Van Dijk untuk menggambarkan kondisi kesenjangan digital, yang terdiri dari motivasi, akses fisik dan materi, keterampilan, dan pemanfaatan teknoogi informasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dengan obyek penelitian pondok pesantren salaf di Kabupaten Rembang.. Metode pengambilan

sampel yang digunakan adalah cluster sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan digital yang dialami santri adalah kesenjangan pada tahap akses fisik dan materi, keterampilan santri dalam mengoperasikan gadget serta pemanfaatan gadget itu sendiri.

Muhammad Zulham, 2014, meneliti tentang bagaimana kesenjangan digital yang terjadi pada guru SMP yang berada di Kecamatan Krian. Penelitian ini dikaji berdasarkan pendapat dan teori dari beberapa ahli mengenai kesenjangan digital yang telah terjadi. Mulai dari faktor aksesibilitas dan kapabilitas teknologi informasi, serta faktor ekonomi dan inovasi yang juga berhubungan dengan kesenjangan digital yang terjadi. Selain itu, juga dikaji mengenai hubungan antara keempat hal di atas dan kategori adopter inovasi dikalangan guru yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan digital yang terjadi adalah dalam hal kapabilitas teknologi informasi oleh guru. Dalam hal aksesibilitas, ekonomi, dan inovasi, kesenjangan yang terjadi tidak begitu signifikan perbedaannya. Hal ini dikarenakan adanya faktor – faktor lain yang

2.2.Kesenjangan Digital

Digital divide mempunyai arti sebagai kesenjangan (gap) antara individu, rumah tangga, bisnis, (atau kelompok masyarakat) dan area geografis pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda dalam hal kesempatan atas akses teknologi informasi dan komunikasi/TIK (information and communication technologies/ ICT) atau telematika dan penggunaan internet untuk beragam aktivitas. Jadi, digital divide atau “kesenjangan digital” sebenarnya mencerminkan beragam kesenjangan dalam pemanfaatan telematika dan akibat perbedaan pemanfaatannya dalam suatu negara dan/atau antar Negara.

Perkembangan teknologi banyak mempengaruhi beragam tatanan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, telematika dinilai sangat penting tak saja karena potensi generiknya sebagai productivity tool dalam penciptaan nilai tambah tetapi juga enabling tool bagi (hampir) semua masyarakat. Karenanya, kesenjangan dalam hal ini berpotensi melahirkan persoalan kesenjangan baru dalam masyarakat atau memperparah persoalan kesenjangan yang ada, terutama di negara berkembang atau kelompok masyarakat/daerah yang relatif tertinggal. Digital divide atau senjang digital mengacu pada kesenjangan atau jurang yang menganga di antara mereka yang dapat mengakses teknologi informasi (TI) dan mereka yang tidak dapat melakukannya. Ketakseimbangan ini bisa berupa ketidakseimbangan yang bersifat fisik (tidak mempunyai akses terhadap komputer dan perangkat TI lain) atau yang bersifat keterampilan yang diperlukan untuk dapat berperan serta sebagai warga digital. Jika pembagian mengarah ke kelompok, maka senjang digital dapat dikaitkan dengan perbedaan sosial-ekonomi (kaya/miskin), generasi (tua/muda), atau geografis (perkotaan/pedesaan). Sejalan dengan berkembangnya dan makin tidak terpisahkannya Internet dengan TI, maka digital divide mencakup juga ketidakseimbangan akses terhadap dunia maya.

Menurut Dewan dkk (2005), kesenjangan digital adalah ketidakmampuan individu dalam merasakan manfaat dari teknologi informasi karena kurangnya aksesibilitas dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi tersebut (Dewan, 2005 : 1). Sedangkan menurut OECD atau Organisation for Economic Cooperation and Development, kesenjangan digital adalah kesenjangan diantara individu, rumah tangga, bisnis, dan area geografis pada level perbedaan sosial ekonomi yang berhubungan dengan kesempatan untuk mengakses informasi dan TI serta penggunaan internet untuk

berbagai aktivitas sehari – hari (OECD, 2001). Berbagai dampak negatif dari kesenjangan digital antara lain berhubungan dengan tingkat penguasaan teknologi informasi dan perbedaan informasi yang didapatkan oleh individu. Individu yang mengalami kesenjangan digital tentu tidak akan mampu menggunakan teknologi informasi secara maksimal. Akibatnya, dalam hal informasi yang didapat juga akan terjadi perbedaan. Selain itu, dampak lain yang dapat terjadi adalah kurangnya akses informasi (lack of information access), ketidakmerataan informasi (information inequality), kemiskinan informasi (information poverty), dan kesenjangan informasi (information divide).

Beberapa faktor yang diidentifikasi berpengaruh terhadap kesenjangan digital antara lain:

- a. Jalan ke akses telekomunikasi
- b. Akses ke internet
- c. Pencapaian pendidikan juga menjelaskan perbedaan akses Bahasa (hampir 90% isi internet dalam bahasa Inggris)
- d. Akses di kawasan kota lebih baik daripada desa

Akses ke teknologi informasi merupakan kunci pembuka pintu untuk memasuki era ekonomi berbasis pengetahuan. Begitu pula dengan akses internet, masyarakat dapat memperoleh segala informasi yang mereka butuhkan yang dapat menjadi peluang untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. (Zulkarimen Nasution, 2007).

Masalah kesenjangan digital (*digital divide*) di Indonesia sebenarnya banyak dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi dan regulasi di berbagai daerah. Sebagai contoh, adanya perbedaan pola hidup antara masyarakat perkotaan dan pedesaan di daerah-daerah yang sudah maju. Masyarakat perkotaan di daerah yang sudah maju mempunyai kemampuan dan wawasan yang lebih tinggi akan teknologi informasi dibandingkan masyarakat perkotaan yang hidup di daerah kurang maju. Demikian pula, masyarakat pedesaan di daerah yang sudah maju, mereka akan mempunyai pengetahuan yang sedikit lebih tinggi untuk mengenal teknologi informasi dibanding masyarakat pedesaan di daerah yang kurang maju (bahkan tidak terjangkau jaringan komunikasi sama sekali). Selain tidak meratanya pembangunan infrastruktur, ada faktor lain yang menjadi masalah dalam kesenjangan digital ini yaitu kekurangan skill SDM.

Dapat dikatakan bahwa negara kaya otomatis dapat mengakses teknologi informasi, sedangkan negara berkembang atau miskin mengalami keterbatasan dalam akses tersebut. Penguasaan terhadap teknologi ini memiliki keterkaitan dengan pembangunan sehingga negara yang mampu menguasai teknologi kemudian juga mampu melakukan pembangunan nasionalnya. Parayil (2005:41) kemudian menilai bahwa kesenjangan digital tidak lain merupakan fenomena kesenjangan kapasitas dan kapabilitas dalam penguasaan teknologi informasi yang sangat berkaitan dengan ketimpangan sosial-ekonomi. Lebih lanjut, Parayil (2005:42) menjadikan GDP sebagai salah satu bentuk nyata dari *digital divide*. Kesenjangan penguasaan teknologi pada akhirnya dapat berdampak pada krisis. Friedman (2000:112) memberikan contoh, yakni krisis Asia 1998 yang diakibatkan oleh tidak

terkontrolnya gerak pasar global bebas yang terhubung secara lintas batas dan waktu melalui teknologi internet. Pasar global ini digambarkan sebagai kawanan elektronik (*electric herd*) dengan saham, obligasi, mata uang, pedagang, dan investor multinasional saling terhubung dengan jaringan internet yang dapat diakses setiap saat (Friedman, 2000:112). Untuk dapat bertumbuh dan berkembang, negara harus masuk dalam kawanan ini kecuali jika ia mampu belajar dan beradaptasi untuk bisa mendapatkan keuntungan dari luar kawanan. Hal ini membuktikan bahwa penguasaan teknologi yang sebagian besar dipegang negara maju memberikan pertumbuhan yang signifikan kepada negara tersebut. Friedman (2000:114) menambahkan bahwa kawanan elektronik dapat memberikan keuntungan jika dikelola dengan benar namun akan berbahaya dan bisa menimbulkan krisis jika tidak dikelola secara optimal.

Dijk (2000) mengemukakan bahwa penyebab kesenjangan digital lebih dikarenakan oleh eksklusifitas sosial ekonomi yang bersumber dari masalah struktur. Solusi yang diajukan Gelder (2006:34) untuk memaksimalkan pembangunan dan menyelesaikan adanya kesenjangan melalui pemberian bantuan hanya berlaku ketika sumber masalah terdapat pada jumlah kepemilikan dan akses teknologi informasi. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah unit komputer dan akses internet tidak serta merta meningkatkan kemampuan untuk mengakses informasi dari internet. Diperlukan pelatihan khusus agar masyarakat yang gagap teknologi bisa menggunakan internet dan memperoleh informasi yang diperlukan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraannya dari pengelolaan informasi tersebut (Dijk, 2000).

Solusi lain yang diajukan untuk mengatasi kesenjangan dan menciptakan tatanan dunia informasi baru adalah melalui pemberian investasi (Friedman, 2000:135). Negara dengan suntikan investasi multinasional yang cukup besar dapat melakukan lompatan dan memperoleh transfer teknologi yang berstandar internasional bagi negaranya. Investasi ini berguna untuk memperoleh teknologi dan perputaran perekonomian yang digerakkan oleh perusahaan multinasional sehingga bisa meningkatkan pendapatan negara. Sesuai dengan yang dikemukakan Parayil (2005), negara dengan tingkat GDP tinggi akan bisa mengakses teknologi informasi secara lebih lagi.

2.3.Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan bagian dari fase dalam kebijakan publik yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam suatu kebijakan. Lebih jauh Lester dan Stewart dalam Winarno (2002: 102) Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Implementasi kebijakan menjadi salah satu tahapan yang cukup penting. Dalam tahap ini, kebijakan yang telah diformulasikan akan diaplikasikan oleh mesin administratif pemerintahan sehingga akan banyak variabel, baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi dari suatu program kebijakan akan melibatkan upaya-upaya dari *policy makers* dalam mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana.

James Anderson pun menyebutkan bahwa dalam kebijakan publik terdapat beberapa kelompok yang mempunyai akses lebih daripada yang lain. Kebijakan publik dalam waktu kapan pun akan merefleksikan kepentingan orang yang dominan. Dalam pembuatan kebijakan tersebut, baik secara ekonomi atau politik, *policy makers* tersebut akan didorong oleh pilihan-pilihan, dan kemudian akan mencari cara untuk memaksimalkan keuntungan yang akan mereka dapatkan.

Keberhasilan implementasi kebijakan juga akan ditentukan oleh banyak variabel dimana masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Variabel ini lah yang kemudian akan membuat kebijakan apakah sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang di formulasikan apa tidak dan akan diketahui pula kelebihan atau kelemahan dari kebijakan tersebut yang akan dijadikan sebagai bahan evaluasi kebijakan untuk kemudian kembali lagi pada proses atau tahapan awal kebijakan tersebut. Menurut George C. Edward III, terdapat empat variabel yang akan mempengaruhi implementasi kebijakan, yakni :1) Komunikasi; 2) Sumber Daya; 3) Disposisi; dan 4) Struktur Birokrasi.

1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Sosialisasi program kebijakan menjadi salah satu cara yang dapat

dilakukan untuk memberitahukan tujuan dan manfaat dari adanya suatu program kebijakan tersebut yang dapat dilakukan melalui berbagai media.

2) Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi sebuah dokumen yang tertulis di kertas.

3) Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP). SOP ini menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan yang

menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Pendapat yang dikemukakan oleh Edward III melahirkan teori baru yang memandang perlu adanya pemerintahan *bottom up* untuk menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Implementasi dengan pendekatan bottom up muncul sebagai kritik terhadap model pendekatan rasional (top down). Empat bidang perhatian yang dikemukakan oleh Edward III belum bisa diartikan sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam suatu kebijakan. Dalam suatu kebijakan faktor-faktor eksternal menjadi salah satu yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini Parsons (2006) mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan. Model *bottom up* adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan consensus. Model pendekatan bottom up menekankan kepada fakta bahwa implementasi di lapangan masih memberikan keleluasaan dalam penerapan kebijakan. Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model implementasi kebijakan dalam perspektif bottom up adalah Adam Smith. Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith ini memandang proses implementasi kebijakan dari proses kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Menurut Smith implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat variable, yaitu:

1. *Idealized policy*

Yaitu pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya.

2. *Target groups*

Yaitu bagian dari policy stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan.

3. *Implementing Organization*

Yaitu badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.

4. *Environmental factors*

Unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Menurut Gerston (1992) dalam Anggraini lebih lanjut mengemukakan bahwa implementasi merupakan “*administrative task of transferring policy commitment into practice*”. Sebagai bagian dari proses kebijakan pembuatan kebijakan publik, implementasi merupakan cara atau bentuk perubahan dari keputusan ke dalam aplikasi. Dengan kata lain, implementasi merupakan upaya untuk melaksanakan yang seharusnya apa yang telah diputuskan oleh pengambil kebijakan. Dari sisi ilmu politik, lebih jauh lagi Grindle (1980) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam

prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih jauh lagi dari itu, implementasi kebijakan menyangkut masalah politik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Sementara itu, Daniel Mazmanian dan Paul A.Sabatier (1983) mengembangkan model implementasi kebijakan publik menjadi tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu karakteristik masalah (*Trackability of the problem*), karakteristik kebijakan (*Ability of statute of structure implementation*), dan lingkungan kebijakan (*Non Statutory Variables Affecting Implementation*) (Subarsono, 2005, hal 94). Model Mazmanian dan Sabatier disebut model Kerangka Analisis Implementasi (*A Framework for Implementation analysis*).

a. Karakteristik masalah

i. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.

Disatu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras tiba-tiba naik. Dipihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relative sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, orupsi, dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya sesuatu untuk diimplementasikan.

ii. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.

iii. Ini berarti suatu program akan relative mudah diimplementasikan apabila kelompokk sasarannya heterogen, maka implementasi program

akan relatif lebih kuat, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relative berbeda-beda.

- iv. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relative mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

b. Karakteristik Kebijakan

- i. Kejelasan isi kebijakan

Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan lebih mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan kebijakan ini merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi.

- ii. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.

Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.

- iii. Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut.

Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan

pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya memerlukan biaya.

- iv. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.

Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertical dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.

- v. Kejelasan dan konsistensi aturan.
- vi. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
- vii. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relative mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

c. Lingkungan Kebijakan

- i. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.

Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relative mudah menerima program-program, pembaruan dibandingkan dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian pula kemajuan teknologi

akan membantu dalam proses tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.

ii. Dukungan Publik Terhadap Kebijakan

Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif, seperti kenaikan harga BBM atau kenaikan pajak kurang mendapat dukungan publik.

iii. Sikap dari Kelompok Pemilih (constituency groups)

Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain 1) kelompok pemilih dapat melakukan investasi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan; 2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan. pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislative.

iv. Tingkat Komitmen Keterampilan dari Aparat dan Implementor.

Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variable yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *post-positivist*. Pendekatan ini memandang realitas tidak bisa ditangkap secara utuh, melainkan hanya bisa diperkirakan. Pendekatan *post-positivist* digunakan untuk mencapai sebuah pemahaman yang mendalam dan menyeluruh dan melihat ilmu sosial sebagai suatu metode yang terorganisir untuk mengkombinasikan logika deduktif dengan pengamatan empiris guna secara probabilistic menemukan atau memperoleh konfirmasi mengenai hukum sebab akibat yang dapat dipergunakan untuk memprediksi pola-pola umum suatu gejala sosial tertentu. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak terlihat, netral, dan obyektif ketika mengukur berbagai aspek dalam kehidupan sosial, meneliti berbagai bukti dan mengulang suatu penelitian lain.

Pendekatan penelitian *post-positivist* ini digunakan oleh peneliti karena peneliti menggunakan teori sebagai *guidance* dalam menguji Kesenjangan Digital dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer di SMP Negeri 25 Pesawaran.

3.2. Fokus Penelitian

Dari uraian tersebut di atas, peneliti mencoba memfokuskan penelitian ini pada beberapa hal, antara lain :

- a. Identifikasi pelaksanaan Program Ujian Nasional Berbasis Komputer yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Pesawaran bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran pada SMP Negeri 25 Pesawaran.

- b. Identifikasi Kesenjangan Digital yang terjadi pada SMPN Negeri 25 Pesawaran

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Kabupaten Pesawaran sebagai Pelaksana Program UNBK dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dan juga salah satu sekolah yang melaksanakan langsung program ini yaitu SMP Negeri 25 Pesawaran.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan diinginkan. Dalam melakukan penelitian deskriptif kualitatif ini, sumber data dari instrument penelitian akan peneliti peroleh dengan cara *Purposive sampling*. Teknik ini peneliti pilih berdasarkan beberapa informasi yang diperoleh dari beberapa media sehingga peneliti dapat mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap obyek atau sample yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selain itu, teknik penarikan sample ini peneliti pilih dengan harapan peneliti dapat memperoleh informasi lebih lanjut dari orang yang terlibat dalam kebijakan dan dapat memberikan keterangan dan memahami masalah yang akan diteliti di lapangan.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut :

1) Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil menatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial informan.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dipilih dalam penelitian ini karena selain peneliti dapat bertatap muka langsung dengan informan, wawancara juga akan membantu peneliti dalam memperoleh data secara lisan langsung dari objek yang mengalami ataupun terlibat langsung maupun tidak langsung. Adapun informan yang akan menjadi target penelitian untuk mendapatkan data primer adalah:

1. Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran
2. Pelaksana kebijakan UNBK di Kabupaten Pesawaran dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.
3. Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Pesawaran
4. Siswa-siswi serta wali murid SMP Negeri 25 Pesawaran

2) Studi Dokumentasi

Studi dokumenter merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menelusuri data historis mengenai objek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari dokumen pemerintah maupun swasta, data di website, maupun dari literatur-literatur lainnya yang

berkaitan dengan implementasi kebijakan. Penelitian-penelitian tentang pelaksanaan kebijakan Ujian Nasional Berbasis Komputer serta kesenjangan digital yang terjadi dengan adanya UNBK tersebut.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisa data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisa proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap suatu proses tersebut, dan menganalisis makna yang ada dibalik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu. Sebelum menganalisa data harus terlebih dulu dikumpulkan dalam berbagai cara yang untuk selanjutnya diproses untuk kemudian siap digunakan. Dalam analisa data kualitatif terdapat tiga alur yang terjadi secara bersamaan yaitu :

1) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan di verifikasi.

2) Penyajian Data

Penyajian diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data, akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus

dilakukan, apakah harus lebih jauh menganalisis atautkah mengambil tindakan, berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Tetapi bentuk penyajian lain yang juga digunakan meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penyajian juga merupakan bagian dari analisis. Merancang deretan dan kolom-kolom sebuah matriks untuk data kualitatif.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum SMP Negeri 25 Pesawaran

Yang dimaksud dengan gambaran obyek penelitian adalah gambaran umum yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi dari obyek yang erat kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun gambaran umum obyek penelitian SMPN 25 Pesawaran adalah sebagai berikut

Profil Sekolah

Nama	: SMPN 25 Pesawaran
Alamat	: Way Ratai/Sidodadi
Daerah	:
Kota/Kabupaten	: Kabupaten Pesawaran
Propinsi	: Lampung
Status Sekolah	: Negeri

Visi:

Kreatif

Inovatif

Berprestasi dan Berbudi Pekerti

Aktif

Ramah Anak dan Lingkungan

Misi:

1. Menyediakan Sarana dan Prasarana penunjang guru.
2. Mendorong Proses Pembelajaran yang Efektif dan Efisien

3. Mendorong Terciptanya Iklim Kerja Yang Aman dan Nyaman bagi Guru dan Siswa
4. Memotivasi Terciptanya Kehidupan Beragama yang Harmonis Antar Sesama Pemeluk Agama
5. Menyediakan Media Pembelajaran Yang Interaktif
6. Menciptakan Lingkungan Sekolah yang Aman, Ramah Anak dan Lingkungan

4.2. Hasil Penelitian

Digital Divide disebut juga kesenjangan digital, adalah masalah sosial mengacu pada perbedaan dari informasi antara mereka yang memiliki akses ke Internet (akses khusus broadband) dengan mereka yang tidak memiliki akses. Istilah menjadi populer di kalangan pihak terkait, seperti para pelajar, pembuat kebijakan, dan kelompok-kelompok advokasi, pada akhir 1990-an. Persoalan *digital divide* atau kesenjangan (gap) pengetahuan dan praktik teknologi digital atau akses terhadap teknologi yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi di berbagai wilayah Indonesia khususnya Provinsi Lampung pada Kabupaten Pesawaran pada pelaksanaan UNBK dimulai pada tahun ajaran 2017/2018. Pengelolaan pendidikan menengah menjadi tanggungjawab dan kewenangan daerah oleh Pemerintah Provinsi.

Akses ke teknologi informasi merupakan kunci pembuka pintu untuk memasuki era ekonomi berbasis pengetahuan. Begitu pula dengan akses internet, masyarakat dapat memperoleh segala informasi yang mereka butuhkan yang dapat menjadi peluang untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. (Zulkarimen Nasution, 2007). Beberapa faktor yang diidentifikasi berpengaruh terhadap kesenjangan digital antara lain:

4.2.1. Jalan ke akses telekomunikasi

Sekarang semuanya berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tahun 2015 misalnya, Kemendikbud mengadakan Uji Kompetensi Guru (UKG) secara online. Hal ini memaksa para guru untuk berlatih menggunakan perangkat komputer. Para guru yang selama ini gaptek (gagap teknologi) akan terkena dampaknya ketika baru belajar di usia yang tidak muda lagi. Hasilnya, UKG secara nasional nilai rata-ratanya 53,02. Padahal target pemerintah adalah nilai 55. Ini artinya secara umum, guru di Indonesia belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Mungkin agak sulit mencapai keterampilan dalam penggunaan TIK kepada para guru yang kebanyakan sudah tidak muda lagi. Tapi Kemendikbud berpengharapan besar kepada para siswa. Apalagi siswa-siswa sekarang mayoritas sudah akrab dengan gadget, smartphone, tablet, laptop atau komputer dan segala aplikasi yang ada di dalamnya.

Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebenarnya bukan hal yang baru. UNBK disebut juga Computer Based Test (CBT) adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT) yang selama ini sudah berjalan.

Penyelenggaraan UNBK pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014 secara online dan terbatas di SMP Indonesia Singapura dan SMP Indonesia Kuala Lumpur. Hasil penyelenggaraan UNBK pada kedua sekolah tersebut cukup menggembirakan dan semakin mendorong untuk meningkatkan literasi siswa terhadap TIK. Selanjutnya secara bertahap pada tahun 2015 dilaksanakan rintisan UNBK dengan mengikutsertakan sebanyak 556

sekolah yang terdiri dari 42 SMP/MTs, 135 SMA/MA, dan 379 SMK di 29 Provinsi dan Luar Negeri.

Pada tahun 2016 dilaksanakan UNBK dengan mengikutsertakan sebanyak 4.382 sekolah yang terdiri dari 984 SMP/MTs, 1.298 SMA/MA, dan 2.100 SMK. Tahun 2017 menurut data yang dikutip di ubk.kemdikbud.go.id diperkirakan ada 5.865 sekolah yang melaksanakan UNBK, dan 3.257 sekolah yang bergabung (menumpang ujian) ke sekolah lain untuk melaksanakan UNBK.

SMP Negeri 25 Pesawaran adalah salah satu sekolah yang menumpang ujian kepada SMA Negeri 1 Padang Cermin karna keterbatasan alat computer dan jaringan internet di sekolah tersebut yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 25 Pesawaran Dra. Uniroh:

“ya, kami dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis computer pertama kali dan memang masih menumpang pada SMA 1, ini dikarenakan bukan hanya tidak ada lab computer disini, jaringan internet di sekolah ini juga tidak ada. Kami pun belum punya pengalaman untuk menyelenggarakan UNBK sama sekali, murid-murid pun belum mengenal dan belum tau bagaimana cara mengoperasikan komputer”

Pernyataan tersebut didukung oleh keterangan dari siswa SMP N 25 bernama Alfian yang mengikuti UNBK pertama kali pada april tahun 2018 silam:

“agak kesusahan awalnya pake computer, karna sebelumnya gak diajarin computer disekolah, dan saya juga gak punya laptop dirumah. Tapi sebelum UNBK ada simulasi atau latihannya dulu beberapa kali, jadi bias ngerjain (soal)”

4.2.2. Akses ke internet

Infrastruktur dan akses internet di daerah Desa Sidodadi sudah cukup memadai sebagai daerah yang dekat dengan daerah wisata laut seperti Pantai Sari Ringgung, Pantai Dewi Mandapa, serta pahawang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Telekomunikasi dan Informasi Kabupaten Pesawaran Totok Sulistyو melalui media online kupatistuntas.co pada Selasa (23/05/2017):

“Untuk merealisasikan koneksi jaringan 4G di Pulau Pahawang, Pemkab Pesawaran menggandeng salah satu provider, PT Telkomsel. Harapannya, jaringan seluler dikawasan tersebut menjadi maksimal dan keindahan pulau pahawang dapat tersebar dan optimal. Untuk kompleks pemda akan tercover paling lambat 5 juni, tapi sementara baru 3G dan itupun sudah lumayan bagus. ”

Namun, fasilitas tersebut tidak didukung dengan tingkat ekonomi yang masih sangat rendah membuat warga sekitar tidak bias memanfaatkan fasilitas signal kuat tersebut selain karena banyak yang tidak mampu, tingkat pendidikan yang rendah pun menjadi masalah utama seperti yang ditulis dalam penelitian Yudi Pratama (2017) bahwa 76,67% warga sekitar hanya menempuh pendidikan sekolah dasar. Hal ini juga disampaikan oleh warga sekitar yaitu Bapak Rimin mengatakan bahwa:

“ yaa, warga sekitar memilih untuk bekerja daripada sekolah, setelah lulus sekolah dasar, ya langsung bias cari uang di kapal (tempat wisata). Anak saya juga lulus SD langsung kerja”

4.2.3. Pencapaian pendidikan juga menjelaskan perbedaan akses Bahasa (hampir 90% isi internet dalam bahasa Inggris)

Menurut Yudi Pratama (2017) dalam penelitiannya bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga di Desa Sidodadi Kecamatan Teluk Pandan mayoritas berpendidikan dasar sebanyak 23 orang dengan persentase (76,67%), dan tingkat pendidikan menengah sebanyak 7 orang dengan persentase (23,33%). Yang menarik disini tidak adanya kepala keluarga yang menempuh tingkat pendidikan yang lebih tinggi melainkan banyak kepala keluarga yang berpendidikan dasar. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat pendidikan kepala keluarga berada pada pendidikan dasar (SD/SMP). Rendahnya pendidikan kepala keluarga secara tidak langsung akan mempengaruhi ke pendidikan anaknya sendiri dikarenakan rendahnya pendapatan yang didapat dari hasil bekerja di objek wisata belum bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi. Namun jika dilihat dari segi tenaga pengajar yang ada di SMP Negeri 25 Pesawaran, guru di sekolah tersebut sudah memiliki tenaga kependidikan yang mengajar mata pelajaran bahasa inggris ada 2 orang guru dan keduanya sudah bersertifikasi. Seperti data yang ada dibawah ini:

Tabel. 4.1 Data Guru SMP Negeri 25 Pesawaran

NO	NAMA	Jabatan	Status Kepegawaian	GOL	IJAZAH	Keterangan
1	Dra. Uniroh	Guru	PNS	III/d	STKIP PGRI Pend. Bahasa Inggris	Sertifikasi
2	Lidia Rosita, S. Pd.	Guru	PNS	IV/ b	FKIP UNILA B. Indonesia	Sertifikasi
3	Dra. Neti Herawati	Guru	PNS	IV/a	STKIP PGRI Pend. B. Indonesia	Sertifikasi
4	Uliana Demak, S.Pd	Guru	PNS	IV/a	FKIP UNILA Pend. Ekonomi	Sertifikasi
5	Marga Mulya H., S. Pd.	Guru	PNS	III/c	STKIP Pringsewu B. Indo	Sertifikasi
6	Deniyati, S. Pd.	Guru	PNS	III/c	Unila FKIP Matematika	Sertifikasi
7	Ferriyanti, S. Pd., M. M.	Guru	PNS	III/c	UBL Manajemen	
8	Uzma Salma Rubiani, S.Pd	Guru	PNS	III/c	FKIP UNILA Geografi	
9	Maria Fransisca, S. Pd.	Guru	PNS	III/c	FKIP UNILA B. Inggris	

NO	NAMA	Jabatan	Status Kepegawaian	GOL	IJAZAH	Keterangan
10	Ardian, S. Pd.	Guru	PNS	III/b	STKIP PGRI Pend. Bahasa Inggris	Sertifikasi
11	Agus Yuwono, S. Pd.	Guru	PNS	III/b	Bahasa dan Sastra Indonesia	
12	Sm Iis Salamah R., S.Pd	Guru	PNS	III/b	UIN Sunan Gunung Djati	
13	Feri Fadli, S.Pd	Guru	PNS	III/b	FKIP UNILA PKn	
14	Siti Fatekah, S.Pd.	TU	PNS	III/ a	STKIP SERA Lahat	
15	Nurtaslikhatul A,S.Pd.	Guru	GTT		FKIP BK	
16	Tri Septiana, S. Pd.	Guru	GTT		STKIP MM. Pend.Ekonomi	
17	Indri Kesuma W,S.Pd.	Guru	GTT		STKIP PGRI Pend. Sejarah	
18	Naila Rosyidah, S.Pd.I	Guru	GTT		STAIN Pekalongan	
19	Aras Arifin	Guru	PTT			
20	Sri Haryani, S.Pd.	TU	PTT		STKIP PGRI Pend. Bahasa Inggris	
21	Tri Meutia, S.Pd	Guru	PTT		STKIP PGRI Pend. IPS Terpadu	
22	Ario Nando, S.Pd	TU	PTT			
23	Abdillah MM., SH	TU	PTT			
24	Martina, S. Pd.	TU	PTT		FKIP Unila Matematika	
25	Firmansyah	Tenaga Perpus	PTT		SLTA	
26	Reni Yusnita Sari, S.Pd	Tenaga Perpus	PTT		STKIP PGRI Bahasa Indonesia	

Sumber: SMPN 25 Pesawaran

4.2.4. Akses di kawasan kota lebih baik daripada desa

Akses ke teknologi informasi merupakan kunci pembuka pintu untuk memasuki era ekonomi berbasis pengetahuan. Begitu pula dengan akses internet, masyarakat dapat memperoleh segala informasi yang mereka butuhkan yang dapat menjadi peluang untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. (Zulkarimen Nasution, 2007).

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, dikutip pada laman pojoksatu.id dalam pidatonya Mendikbud mengatakan sedikitnya ada tiga kesenjangan yang terjadi di dunia pendidikan. Makanya menurut Muhadjir, tak ada perbedaan dalam pendidikan. Muhadjir menjelaskan, tiga jenis kesenjangan dalam pendidikan tersebut yakni; pertama yakni

kesenjangan struktural yang disebabkan karena kebijakan; kedua kesenjangan kultural karena budaya, misalnya ada orang yang masih menganggap pendidikan kurang penting. Ketiga kesenjangan spasial karena perbedaan desa dan kota. Yang tinggal di desa harus ada usaha lebih banyak untuk dapat mengakses pendidikan.

BAB VI. JADWAL PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dalam waktu 6 bulan atau. Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan penelitian ini:

NO	KEGIATAN	BULAN					
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt
1	Pembuatan Proposal						
2	Pengumpulan Proposal						
3	Pengumpulan Data						
4	Analisis Data						
5	Penyusunan Laporan						
6	Publikasi Ilmiah						

BAB VII. PERSONALIA PENELITIAN

1. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Nana Mulyana, S.I.P, M.Si
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 197106152005011003
- d. Disiplin ilmu : Administrasi Publik
- e. Pangkat/Golongan : Lektor
- f. Jabatan fungsional/struktura : Penata III/c
- g. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- h. Waktu penelitian : jam/minggu

2. Anggota Peneliti : 2 orang

(rincian seperti butir 1, maks. 2 orang)

1. Tenaga Laboran/Teknisi : -

(nama dan keahlian, maks. 2 orang)

2. Pekerja Lapangan/Pencacah : 2 orang

3. Tenaga Administrasi (1 orang) : -

4. Anggota Peneliti 1

- a. Nama Lengkap : Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIP : 198506202008122001
- d. Disiplin Ilmu : Administrasi Publik
- e. Pangkat/Golongan : Penata Muda .Tk. I. III/b
- f. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- g. Fakultas/Jurusan : ISIP/Administrasi Publik
- h. Waktu Penelitian : jam/minggu

3. Anggota Peneliti 2

- a. Nama Lengkap : Anisa Utami, S.IP, M.A
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIP : -
- d. Disiplin Ilmu : Administrasi Publik
- e. Pangkat/Golongan : Dosen Tetap Non PNS
- f. Jabatan Fungsional : -
- g. Fakultas/Jurusan : ISIP/Administrasi Publik
- h. Waktu Penelitian : jam/minggu

BAB VIII. LAPORAN KEGIATAN PENELITIAN

Rincian biaya penelitian mengacu pada kegiatan penelitian seperti diuraikan pada metode penelitian, dengan rekapitulasi biaya penelitian sebagai berikut :

Tabel 8.1 Perkiraan Biaya Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Pengumpulan data			
	a.Transportasi dan komunikasi	2 pk	100.000,-	2.000.000,-
	b.Foto copy	1 pk	500.000,-	500.000,-
2	Persiapan pembuatan proposal (pembelian kertas, alat tulis, printer, tinta printer, dan CD)	1 pk	2.000.000,-	2.000.000,-
3	Pengadaan literatur dan jurnal tambahan	10 bk	50.000,-	500.000,-
4	Pengolahan , analisis bahan/data	1 pk	1.000.000,-	1.000.000,-
5	Seminar hasil penelitian	1 pk	1.000.000,-	1.000.000,-
6	Penggandaan laporan hasil penelitian	10 eks	50.000,-	500.000,-
7	Dokumentasi dan Publikasi	1 pk	2.500.000,-	2.500.000,-
Total biaya				Rp10.000.000,-
Terbilang ----- (Sepuluh Juta rupiah)				

Sumber : Diolah oleh peneliti

DAFTAR PUSTAKA

- A Nation Online, 2002 : How Americans Are Expanding Their Use of the Internet. USA : U. S Departement of Commerce.
- Acilar, Ali. 2011 : Exploring the Aspects of Digital divide in a Developing Country. Bilecik University, Turkey.
- Burhan, Bingin. 2005 : Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta : Prenada Media Grup.
- Dewan, S and Riggins, F. J, 2005 : The Digital Divide : Current and Future Research Directions. xxx : Journal of the Association for Information Systems.
- Fuchs, C dan Horak, Eva. 2007 : Informational Capitalism and Digital Divide in Africa.
- Masaryk University : Journal of Law and Technology.
- Hall, Bronwyn H dan Khan, Beethika. 2002 : Adoption New Technology. California : New Economy Handbook.
- Kadiman, Kusmayanto. 2006 : Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 2005 – 2025. Jakarta : Kementrian Negara Riset dan Teknologi.
- Keniston, Kenneth dan Kumar, Depak. 2003 : The Four Digital Divide. New Delhi : Sage Publisher.
- Kim, Yong Jin. 2003 : A Theory of Digital Divide : Who Gains and Loses from Technology Changes ?. xxx : Journal of Economic Development.
- Nahon, Karine Barzilai, 2006 : GAPS AND BITS: CONCEPTUALIZING MEASUREMENTS FOR DIGITAL DIVIDE/S. Washington : The Information Society.
- Nusantara, Toto. 2010 : Peran Teknologi Informasi dalam Pendidikan. Malang : Universitas Negeri Malang.
- Nusantara, Toto. 2010 : Peran TI dalam Pembelajaran. Solo : Seminar Nasional Universitas Sebelas Maret Solo.
- Prensky, Mark, 2001 : Digital Natives, Digital Immigrants. xxx : University Press.
- Rahman, Arief dan Quaddus, Muhammed. 2012 : Qualitative Investigation of Digital Divide in Indonesia (Toward to Comprehensive Framework). Geelong : Curtin Graduate School of Business.

- Rallis – Helen Morgan, 2009 : Digital Natives and Digital Immigrants : Exploring the Intergenerational Digital Divide. xxx : UMD.
- Robinson, Les. 2009 : A Summary of Diffusion of Innovations. xxx : Enabling Change
- Rogers, Everett M; Singhal, Arvind; dan Quinlan, Margaret M. xxx : Diffusion of Innovation. New York : Routledge.
- Sahin, Ismail. 2006 : Detailed Review of Rogers' Diffusion of Innovations Theory and Educational Technology – Related Studies Based on Rogers' Theory. Iowa : Iowa Stated University – TOJET (The Turkish Online Journal of Educational Technology).
- Selhofer, Hannes dan Husing, Tobias. The Digital Divide Index – A Measure of Social Inequalities in the Adaption of ICT. Bonn :
- Singarimbun, Masri. 1989 : Metode Penelitian Survai. Jakarta : LP3S.
- Subagyo, Joko. 1991 : Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta : PT Trineka Cipta.
- Sugiyono. 2008 : Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung : Alfabeta.